



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2022/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANNY AMALIYA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 741680

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.810.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m²/120 m² di MALANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m²/135 m² di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
3. Tanah Seluas 147 m² di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 110.250.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m²/55 m² di KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
5. Tanah Seluas 770 m² di PAMEKASAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 333.000.000

1. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO 1,5 E Tahun 2017, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,5 VELOZ MT Tahun 2017, HIBAH TANPA AKTA Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 394.023.000

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 255.882.102

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.793.155.102

III. HUTANG

Rp. ---



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.793.155.102

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.